

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan film di Indonesia akhir-akhir ini memang bisa dikatakan cukup signifikan. Terlihat dari banyaknya judul film yang muncul di bioskop-bioskop di Indonesia saat ini. Film-film yang menghadirkan cerita-cerita yang berbeda membuat dunia perfilman Indonesia semakin berwarna. Banyak genre dan tema film yang ditawarkan seperti horror, komedi satir, drama romantis, drama keluarga bertema *education*, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya perkembangan film beserta kebebasannya dalam mengangkat sebuah realita disekitarnya tidak semudah yang di bayangkan. Hal ini terlihat dari kondisi pers, di mana pada masa sebelum reformasi seperti saat ini kebebasan pers sangat ditentukan oleh para penguasa. Apapun realita yang ditunjukkan kepada publik tetap harus atas pengawasan para penguasa tersebut. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pers ini membuat mereka tunduk dan tidak bisa mendapatkan kebebasan sepenuhnya dalam mengungkap sebuah realita yang sebenarnya sedang terjadi disekitarnya.

Zaman dulu, ancaman terhadap kebebasan pers bisa berupa berbagai imbauan, teguran, dan panggilan terhadap redaksi yang dilakukan mulai dari Markas Besar ABRI Cilangkap, Kejaksaan Agung, Direktorat PPG, Departemen Penerangan, PWI, hingga organisasi preman yang bernaung di bawah ketiak kekuasaan. Pers yang berupaya bertahan hidup terpaksa melakukan swasensor dan, untuk menuliskan hal-hal yang peka, pers terpaksa menggunakan kata-kata berbentuk eufemisme (Etika Jurnalisme: Debat Global, ISAI 2006). (http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail_politik_pemilu&id=467, akses tanggal 11 Mei 2009)

Begitu pula dengan realita yang terdapat pada sebuah film. Pada masa dahulu jika melihat kondisi pers pada masa itu, sudah pasti hal itu pun juga terjadi pada dunia perfilman. Dalam hal ini terlihat dari adanya perbedaan yang sangat mendasar tentang pemahaman fungsi film itu sendiri dahulu dengan sekarang.

Dari “alat informasi” dengan potensi ancaman pada kekuasaan dan keamanan negara, film beralih menjadi “aset budaya” dengan potensi menjerakan masyarakat. Perubahan kepengurusan ini berakibat pada perubahan fungsi kontrol isi film dan pelaksanaan perfilman. Kendali kini dialihkan dari tangan pemerintah ke tangan masyarakat. Pemerintah kini “bertugas” melayani masyarakat melalui tindakan memelihara dan mengembangkan film sebagai salah satu aset budaya bangsa. (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/02/Bentara/1857854.htm>, akses tanggal 11 Februari 2009).

Hal tersebut di atas terlihat dari tidak banyaknya film-film dahulu yang menghadirkan sebuah realita dan peristiwa yang tidak lazim yang terjadi disekitarnya, baik tentang masyarakat maupun pemerintahannya. Keberanian untuk mengkritisi kinerja pemerintahan tidak sebebaskan seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada akhirnya tidak banyak masyarakat yang tahu tentang apa yang sebenarnya yang sedang dilakukan pemerintahan pada masa itu kepada mereka. Alih-alih melindungi masyarakat (khususnya anak-anak) dari tayangan-tayangan yang belum sesuai dengan kematangan mental mereka, LSF lebih berfungsi untuk mengungkung akses masyarakat pada informasi-informasi tentang ideologi yang (dianggap) bertentangan dengan ideologi Pancasila. (<http://www.filmalternatif.org/?m=article.detail&id=17>, akses tanggal 2 Februari 2009). Dari banyaknya masalah pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak pada masa itu, termasuk di dalamnya adalah sebuah kebijakan mengenai pembangunan.

Di mana pembangunan di Indonesia yang pada dasarnya sudah diawali dan dimulai sejak masa Orde Baru hingga masa sekarang ini. Akan tetapi jika kembali melihat pada konsep pembangunan pada masa Orde Baru, agaknya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan utama pembangunan itu sendiri yaitu untuk perubahan menuju pembinaan bangsa yang lebih baik. Semua itu terlihat dari pembangunan pada masa itu yang lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha, sehingga pembangunan tersebut tidak merata keseluruh lapisan masyarakat khususnya kalangan bawah. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengusuran-pengusuran secara paksa di tempat-tempat seperti pasar, pedagang kaki lima, tanpa adanya kepastian dari pihak pemerintah dalam penyelesaiannya.

Pembangunan Orde Baru praktis berjalan sejak tahun 1971 dan akhirnya kandas pada tahun 1996 (25 tahun), tatkala tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian meluluhlantahkan pembangunan yang telah dibuat Orde Baru. Jika diamati dengan kepala dingin, kekeliruan utama Orde Baru adalah gagalnya memenuhi janjinya kepada rakyat. Pada awal pembangunan, janji yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan adalah pembangunan yang berbasis rakyat. (Nugroho, 2001:377).

Pada dasarnya fenomena tersebut di atas merupakan fenomena besar yang sangat merugikan rakyat pada masa itu. Akan tetapi karena tidak adanya informasi yang cukup kepada masyarakat pada masa itu, sehingga hal ini pada akhirnya hanya menjadi sebuah realita yang tersimpan rapi dipusat pemerintahan saja. Hal ini jelas berbeda dengan masa sekarang, di mana dengan kebebasan yang sepenuhnya dimiliki oleh media massa seperti film, sehingga realita tersebut di atas sangat memungkinkan untuk diangkat dan disajikan oleh banyak film saat ini, termasuk film yang berjudul *Nagabonar Jadi 2*. Hal ini seperti yang diungkapkan Yusuf Kalla pada surat kabar *Suara Merdeka* edisi Senin, 07 Mei 2007, sehabis

menonton film ini bersama beberapa Menteri yang mendampingiya. “Film ini lucu dan kocak, tapi juga ada nilai-nilai kebangsaan yang kuat dalam pribadi tokoh itu”...Dalam hal ini beliau mencontohkan soal kritik penggusuran lapangan untuk dibuat mall dan gedung pencakar dengan mengkorbankan kepentingan rakyat. (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0705/07/nas02.htm>, akses tanggal 17 Mei 2009).

Hal ini dikarenakan melihat realita pembangunan saat ini yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan masa Orba, di mana seperti yang terdapat pada sebuah pemberitaan di media massa *Kompas*, berikut ini yang menjelaskan bahwa pembangunan saat ini masih menempatkan rakyat kecil sebagai korban dari kekuasaan.

“Rakyat miskin dan tertindas itu justru dianggap hina, direndahkan, dicaci maki, dijadikan sasaran tuduhan sebagai penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau dan perusak keindahan tata kota (blaming the victim). Mereka tidak diperhitungkan, bahkan tidak dianggap subyek di tengah masyarakat, kecuali oleh kepentingan pemegang kekuasaan yang perlu melibatkan rakyat miskin sebagai obyek pemenuhan syarat legitimasi politiknya” (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/03/opini/1414970.htm>, akses tanggal 14 April 2009).

Pendapat tersebut di atas muncul karena pesan yang disampaikan dalam film ini mudah untuk dipahami dan diterima bagi para penontonnya karena tidak jauh berbeda dengan realita yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebab, film dapat menjadi sebuah sarana yang cukup efisien dalam mengkonstruksikan sebuah realitas yang tengah terjadi disekitar kita. Selain itu, dengan melihat kondisi perfilman di Indonesia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu seperti sekarang ini, agakny hal ini membuat pesan yang disampaikan melalui sebuah film akan dapat mudah tersampaikan dan diterima. Hal ini disebabkan setiap

tanda, teks serta simbol-simbol yang ada di dalamnya mengacu pada suatu kenyataan yang ada disekitar kita. Salah satunya adalah realita tentang sebuah kebijakan tentang pembangunan di Indonesia.

Pesan dan kritikan yang disampaikan tentang pembangunan dalam film Nagabonar Jadi 2 tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari rekonstruksi media massa terhadap sebuah realita yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, dan film ini terbilang cukup berhasil dalam mengemasnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian penonton maupun berbagai penghargaan yang didapat. Seperti data yang ditunjukkan oleh harian surat kabar *Kompas* edisi sabtu, 15/3/2008, bahwa, “film Nagabonar Jadi 2 yang disutradarai aktor kawakan, H. Deddy Mizwar, terbilang sukses dalam pencapaian jumlah penonton dan bisa meraih penghargaan sebagai Film Terbaik 2007. Jumlah penonton film itu mencapai 1 juta orang dalam waktu 36 hari. . . “ (<http://entertainment.kompas.com/sinema>, akses tanggal 9 Januari 2009).

Sebuah angka yang cukup besar bagi sebuah film yang bergenre berbeda dengan yang lainnya pada saat itu. Selain itu hal ini juga memperlihatkan, bahwa media massa seperti film ini dalam mengangkat dan menampilkan kembali sebuah realitas yang terjadi di sekitar khususnya tentang sebuah realitas yang terjadi disekitar saat ini cukup berhasil. Nagabonar Jadi 2 merupakan salah satu contoh film yang berhasil mengangkat dan menghadirkan kembali sebuah realitas sosial yang terjadi khususnya tentang fenomena pembangunan di Indonesia ke layar lebar.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, oleh karenanya rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana representasi pembangunan dalam film Nagabonar Jadi 2”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan representasi pembangunan dalam film “Nagabonar Jadi 2”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat memiliki manfaat bagi perkembangan dan pendalaman bagi peminat studi komunikasi khususnya tentang film sehingga mampu menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi penulis skenario untuk lebih mengutamakan kualitas dalam pembuatan film yang dapat diunggulkan.

3. Manfaat Kritik Sosial

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat kritik sosial khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai pembangunan di Indonesia saat ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini disusun berdasarkan alur berfikir penelitian yang bersumber pada paradigma interpretatif dengan menggunakan pendekatan semiotik. Selain itu, kerangka teori dalam penelitian ini memiliki fungsi guna menjelaskan dan meramalkan fenomena. Adapun teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif, teori semiotik dalam kajian komunikasi, semiotika Roland Barthes, konstruksi realitas sosial dalam media massa, film sebagai media representasi, dan Pembangunanisme Indonesia. Masing-masing tinjauan tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut:

1. Paradigma Interpretatif

Sebuah paradigma hadir karena semakin banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis yang ditunjukkan dengan banyaknya hasil-hasil penelitian manusia. Paradigma menurut Bogdan dan Biklen (1982:32), adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 2001:30).

Begitu pula dengan paradigma Interpretatif atau juga yang dikenal dengan paradigma Konstruktivis. Menurut Neuman (2000:70) paradigma ini muncul dan banyak dipelopori oleh dua orang pemikir terkenal Jerman yaitu Max Weber, yang sangat berpengaruh dalam sosiologi, dan Wilhem Diltey, yang banyak memberi kontribusi dalam kajian filsafat. Paradigma kontrukstivis yang dipopulerkan oleh keduanya berakar dari kajian hermeneutika (*hermeneutics*) di

abad 19 M. Hermeunitika sendiri merupakan fenomena khas yang hanya dimiliki manusia sebagai makhluk simbolis. (Neuman dalam Junaedi, 2007:14-15).

Hal senada juga diungkapkan oleh Mansour Fakih, dimana dasar filsafat dari paradigma interpretative adalah *phenomenology* dan *hermeneutics*, yakni suatu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami dan memberi makna atas simbol secara tepat. (Mansour Fakih dalam Heryanto, 1996:44). Secara metodologis, kritisme yang terkandung dalam teori-teori interpretatif utamanya hermeneutika menyebabkan cara berpikir mazhab kritis (*Frankfurt School*) terbawa pula ke dalam kajian semiotik. Aliran frankfurt terkenal kritis dengan persoalan lambang atau simbol, yang dipakai sebagai alat persekongkolan dan hegemoni. (Sobur, 2006:147).

Selain itu Paul Ricoeur (1985:43) juga memaparkan bahwa hermeneutika tidak semata-mata didefenisikan sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol melainkan memperhatikan pada teks. Teks (*text*) sendiri merupakan turunan dari kata *texture* (bahasa Yunani), yang berarti rajutan, tentu saja disini teks dipahami sebagai rajutan dari berbagai tanda bahasa. Mengenai tugas hermeneutika, Ricoeur mengungkapkan bahwa tugas utama hermeneutika adalah di satu pihak mencari dinamika yang terjadi secara internal yang meregulasi secara struktural kerja di dalam sebuah teks, di sisi lain mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan teks tersebut muncul kepermukaan. Secara gamblang Ricoeur menyatakan bahwa pengertian dari hermeneutika adalah “teori pengoperasian pemahaman dalam relasinya dengan interpretasi atas teks”. (Paul Ricoeur dalam Junaedi, 2007:15).

Dalam kajian ilmu tentang tanda, agaknya hal ini dapat dijadikan sebagai nilai-nilai yang menjadi sebuah dasar penelitian bagi setiap penulisnya. Setiap tanda, teks serta bahasa yang disampaikan dan ditunjukkan dalam sebuah proses aktivitas berkomunikasi melalui berbagai media memiliki peluang yang cukup besar untuk ditafsirkan dan dimaknai tidak hanya dari satu sisi melainkan dari berbagai sisi tergantung konteks pemikiran dari setiap penafsirnya.

2. Teori Semiotik Dalam Kajian Komunikasi

Pendapat mengenai tiada hari tanpa berkomunikasi (*We cannot not communicate*) agaknya sangat-sangat memberikan sebuah makna yang cukup mendalam bagi seseorang karena tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak berkomunikasi dan berinteraksi kepada lingkungan sekitarnya, karena dengan berkomunikasi manusia dapat saling bertukar pikiran dan menyampaikan segala gagasan serta pendapat-pendapatnya mengenai suatu objek tertentu baik itu tentang perilaku orang lain maupun perilaku diri sendiri, sebab setiap perilaku seseorang memiliki potensi untuk ditafsirkan.

Komunikasi adalah proses transmisi sebuah pesan yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Seperti yang diutarakan oleh Bernard Berelson dan Gary A. Yaitu: “Komunikasi: transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol---kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi”. (Bernard Berelson dan Gary A dalam Mulyana, 2005:62). Sedangkan isi pesan secara umum dipandang sebagai pikiran. Sebuah kata-kata

yang ada di dalam suatu pesan mengandung dua pengertian, yakni denotatif dan konotatif” (Effendy, 1997 : 12).

Komunikasi menurut John Fiske adalah merupakan sebuah proses transmisi sebuah pesan (*transmission of messages*). (Fiske, 1990:2). Dalam hal ini perhatian komunikasi berpusat dari bagaimana pengirim dan penerima, *enkoding* dan *dekoding* dengan bagaimana seseorang mentransmisikan sebuah pesan menggunakan saluran dan media-media komunikasi yang ada. Hal ini agar nantinya dapat menjadi sesuatu hal yang efisien dan aktual. Disini komunikasi juga dilihat sebagai sebuah proses yang memiliki efek dapat mempengaruhi sikap dan pikiran seseorang dengan yang lainnya. Jika efek tersebut berbeda atau lebih kecil dari yang diharapkan, hal ini dapat dikatakan sebagai kegagalan komunikasi, dan untuk melihat pada bagian proses dalam menemukan dimana terjadinya kegagalan itu, untuk mudahnya Fiske mengelompokkannya pada mazhab ‘proses’.

Selain itu komunikasi juga dapat dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna (*production and transmission of meanings*). (Fiske, 1990:2). Di mana dalam hal ini perhatian komunikasi bertumpu pada bagaimana pesan, atau teks, interaksi dengan seseorang dalam memproduksi atau menghasilkan makna-makna. Ini berarti, komunikasi berpusat pada peran dari teks itu sendiri dalam budaya kita. Hal tersebut dapat diartikan atau ditafsirkan dan tidak menganggap kesalahpahaman menjadi bukti yang penting dalam kegagalan komunikasi. Mereka atau kesalahpahaman ini dapat dihasilkan melalui budaya-budaya yang berbeda dari pengirim dan penerima pesan. Untuk mazhab ini, studi komunikasinya adalah studi tentang teks dan budaya. Metode dari studi ini adalah

semiotik (ilmu tentang tanda dan makna) yang disebut Fiske untuk digunakan dalam mengidentifikasi pendekatan ini.

Secara etimologis, istilah *semiotik* berasal dari kata Yunani *semeion* yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan jika dilihat secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. (Sobur, 2006:95). Semiotika sendiri memandang komunikasi sebagai pembangkitan makna dalam pesan, baik oleh penyampai maupun penerima (*encoder* atau *decoder*). (Fiske, 2006 : 68). Selain itu semiotik sebagai salah satu model dari ilmu sosial yang mempelajari hakikat dari sebuah tanda juga digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks media dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Teks yang tersusun atas seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna tunggal. (Sobur, 2006:95).

Berkenaan dengan pendekatan dari studi semiotik yang berpusat pada tanda (*sign*), John Fiske memaparkan tiga area penting dalam studi semiotik, yakni (Fiske, 1990:40):

1. *The sign itself. This consists of the study of different varieties of signs, of different ways they have of conveying meaning, and of the way they relate to the people who use them. For signs are human constructs and can only be understood in terms of the uses people put them to.*

(Tanda itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan beragam tanda yang berbeda, seperti cara mengantarkan makna serta cara menghubungkannya dengan orang yang menggunakannya. Tanda adalah buatan manusia dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menggunakannya).

2. *The codes of systems into which signs are organized. This study covers the ways that a variety of codes have developed in order to meet the needs of a society or culture.*

(Kode atau sistem dimana lambang-lambang disusun. Studi ini meliputi bagaimana beragam kode yang berbeda dibangun untuk mempertemukan dengan kebutuhan masyarakat dalam sebuah kebudayaan).

3. *The culture within which these codes and signs operate.*

(Kebudayaan dimana kode dan lambang itu beroperasi). (Sobur, 2006:94).

Semua itu juga ditegaskan oleh Ferdinand de Saussure (1990:15), yaitu:

‘semiotika’ (*semiotics*) di dalam *Course in General Linguistics*, sebagai “ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial”. Implisit dalam definisi tersebut adalah sebuah relasi bahwa bila tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial, maka tanda juga merupakan bagian dari aturan-aturan sosial yang berlaku. Ada sistem tanda (*sign system*) dan ada sistem sosial (*social system*), yang keduanya saling berkaitan. Dalam hal ini, Saussure berbicara mengenai konvensi sosial (*social convention*) yang mengatur penggunaan tanda secara sosial, yaitu pemilihan, pengkombinasian dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu, sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. (Ferdinand de Saussure dalam Sobur, 2006:vii).

Pada dasarnya jika melihat definisi-definisi diatas bahwa semiotika adalah merupakan disiplin ilmu dan metode penelitian yang mengkaji tentang apapun bentuk tanda yang berdasarkan pada kode-kode yang menjadi sistem tanda itu sendiri dalam kehidupan sosial yang ada tanpa terkecuali tanda-tanda yang ada pada sebuah film yang merepresentasikan sebuah realitas sosial yang terdapat dalam sebuah film. Oleh karena itu semiotik menjadi pendekatan penting dalam teori media.

3. Konstruksi Realitas Sosial Dalam Media Massa

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik. Menurut Tuchman (1980) disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”. (Tuchman dalam Sobur, 2006:88).

Selain itu isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya. (Sobur, 2006:88).

Istilah konstruksi realitas sosial menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of knowledge*, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia yang di bawah judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (1990).

Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung

kepada kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik. Selain itu Berger dan Luckmann juga memaparkan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui proses subyektif eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial, dalam pandangan mereka, tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. (Berger dan Luckmann dalam Sobur, 2006:91).

Selain itu konsep konstruksi merupakan kajian dari ilmu sosiologi pengetahuan sebagaimana yang dikaji oleh Berger dan Luckmann bahwa tugas sosiologi ilmu pengetahuan adalah menekuni analisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*). Secara mendalam mengungkapkan, bahwa kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna yang subyektif bagi mereka sebagai suatu dunia yang koheren. (Berger, 1990:28).

Sedangkan dalam proses pengkonstruksian sosial diperlukan adanya sebuah *knowledge* dan manusia mendapatkan *knowledge* tersebut melalui luasnya wacana sosial di dalam lingkungannya yang mampu melintasi waktu dan tempat yang merepresentasikan dan memperkuat dominasi sistem kepercayaan dalam masyarakat. Selain *knowlade*, konstruksi sosial juga menekankan akan pentingnya sebuah bahasa dalam proses pengkonstruksiannya karena bahasa sumber dari makna yang dapat menciptakan suatu konstruksi realitas sosial. (Blumer dalam Griffin, 2003:56).

Bahasa, yang disini bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem tanda-tanda suara, merupakan sistem tanda yang paling penting dalam masyarakat manusia.

Landasannya, sudah tentu, terletak dalam kapasitas intrinsik organisme manusia untuk mengungkapkan diri dengan suara, tetapi kita baru bisa bicara tentang bahasa apabila ekspresi-ekspresi suara itu sudah bisa

dilepaskan dari keadaan “di sini dan sekarang” yang langsung dari subyektivitas. Obyektivitas yang umum dari kehidupan sehari-hari pertama-tama dipertahankan oleh signifikasi bahasa. Bahasa lahir dalam situasi tatap muka, namun dengan mudah dapat dilepaskan darinya. (Berger, 1990:52).

Selain itu, bahasa menurut Gorys Keraf merupakan alat komunikasi yang cukup penting. “Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia”. (Keraf, 1994:1). Dalam hal ini bahasa mampu tidak hanya untuk membangun simbol-simbol yang sangat diabstraksikan dari pengalaman sehari-hari, melainkan juga untuk “mengembalikan” simbol-simbol itu dan menghadirkannya sebagai unsur-unsur yang obyektif nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, simbolisme dan bahasa simbolik menjadi unsur-unsur esensial dari kenyataan hidup sehari-hari dan dari pemahaman akal sehat mengenai kenyataan ini. (Berger, 1990:57).

Dalam hal objektivasi Berger memaparkan bahwa terdapat salah satu hal yang penting didalamnya yaitu proses signifikasi yang merupakan pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda (*sign*) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya karena tujuannya yang eksplisit sebagai isyarat atau indeks bagi makna-makna subyektif. Tanda-tanda dan sistem-sistem tanda merupakan objektivasi dalam arti dapat digunakan melampaui batas ekspresi maksud-maksud subyektif “di sini dan sekarang”. Selain itu tanda dan sistem tanda semuanya bercirikan “dapat dilepaskan” tetapi dapat dibedakan dari segi sejauh mana mereka dapat dilepaskan dari situasi tatap muka. (Berger, 1990:50-52).

Selanjutnya dalam proses intersubyektif yang telah diobjektivasi, bahasa kemudian menjadi tempat penyimpanan kumpulan besar endapan-endapan kolektif, yang bisa diproses secara monolitik dalam arti sebagai keseluruhan yang kohesif dan tanpa mengkonstruksikan lagi proses

pembentukannya semula. Dengan kata lain, berbagai legitimasi bisa silih berganti hadir, dan dari waktu ke waktu memberikan makna-makna baru pada pengalaman-pengalaman yang sudah diendapkan dalam kolektivasi yang bersangkutan. (Berger, 1990:98).

Dalam setiap bentuknya media massa adalah merupakan saluran atau wadah untuk menyampaikan proses komunikasi massa. Oleh sebab itu dengan segala kemampuannya media massa mampu menjadi salah satu alternatif dalam menyampaikan dan mengkonstruksikan setiap kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Media massa terdiri dari beberapa bentuk seperti radio, televisi, surat kabar dan juga film. Film pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menunjukkan dan mengkonstruksikan setiap realitas sosial yang terjadi dan menyampaikannya ke masyarakat luas dalam bentuk komunikasi massa.

4. Film Sebagai Media Representasi

Film merupakan salah satu bentuk atau alat media massa yang memiliki kegunaan untuk menyampaikan komunikasi massa. Melalui sebuah film pesan yang disampaikan dapat menjadi efektif melihat kondisi perfilman saat ini yang semakin tumbuh dan berkembang dengan cukup baik. Selain itu film juga dapat merepresentasikan setiap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Film dapat mempengaruhi pikiran dan bahkan dapat merubah sikap dari setiap penontonnya melalui pesan-pesan dalam bentuk visual yang ditunjukkan dalam sebuah film.

Pada dasarnya pesan yang digambarkan melalui media massa bersifat umum (*public*) karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum.

Oey Hong Lee, menyebutkan :

“film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke - 19, dengan perkataan lain pada unsur - unsur yang merintangikan perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur – unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangikan kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke – 19. film kata Oey Hong Lee, mencapai puncaknya di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, namun kemudian merosok tajam setelah tahun 1945, seiring munculnya medium televisi” (Oey Hong Lee dalam Sobur, 2004 : 126).

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar. (Irawanto dalam Sobur, 2006:127). Film merupakan salah satu wadah atau media yang mampu merepresentasikan realitas-realitas sosial dengan cara menyampaikannya dalam bentuk pesan yang ditujukan kepada masyarakat umum.

Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner, berbeda dengan film sekedar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. (Turner dalam Sobur 2006:127).

Selain itu, dalam hal ini Sobur juga menjelaskan mengenai kemampuan sebuah film dalam mengangkat sebuah realitas dan menghadirkannya kembali ke atas layar, bahwa:

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan

untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. (Sobur, 2006:31).

Representasi adalah suatu produksi makna melalui bahasa yang mempunyai dua hal yang prinsip, yaitu :

Menjelaskan dan menggambarkan sesuatu dalam pikiran dengan sebuah gambaran imajinasi untuk menempatkan persamaan ini dalam pikiran atau perasaan kita. Prinsip kedua adalah representasi digunakan untuk menjelaskan konstruksi makna sebuah simbol sehingga kita dapat mengkomunikasikan makna objek melalui bahasa kepada orang lain yang bisa mengerti dan memahami konvensi bahasa yang sama. (Hall, 1997:16).

Sedangkan representasi menurut Chiara Giaccardi dapat diartikan sebagai *to depict, to be a picture of or speak for (in the place of, in the name of) somebody*. Untuk melukiskan, untuk menjadi gambaran atau berbicara atas nama (sebagai pengganti, atas nama seseorang). (Noviani, 2002 : 61). Sebuah film akan menggambarkan pesan yang akan disampaikan kepada para penontonnya. Seperti halnya pada film Nagabonar Jadi 2 ini, pada film ini pembangunan masa sekarang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil digambarkan dengan menampilkan pola hidup serta pikiran-pikiran melalui sebuah sindiran melalui tanda bahasa. Di mana tanda bahasa adalah representasi yang sifatnya sederhana dari suatu objek atau kondisi, tanda bahasa mempunyai relasi yang jelas dengan objek yang dilambangkannya. (Junaedi, 2005 : 16). Tanda – tanda tersebut dapat membentuk citra atau *image*, lebelisasi terhadap golongan sosial tertentu, membentuk sebuah identitas yang pada akhirnya akan membawa sebuah perbedaan antara golongan – golongan.

“Ada beberapa unsur penting dalam sebuah representasi, yakni : pertama adalah *stereotype* yaitu pelabelan terhadap sesuatu yang sering digambarkan secara negatif. Kedua adalah *identity*, yaitu pemahaman kita terhadap kelompok yang direpresentasikan. Ketiga, adalah pembedaan

(*difference*), yaitu mengenai perbedaan antar kelompok sosial, dimana satu kelompok diposisikan dengan kelompok yang lain. Keempat adalah naturalisasi (*naturalization*), yaitu strategi representasi yang dirancang untuk mendesain menetapkan *difference*, dan menjaganya agar kelihatan alami selamanya. Kelima adalah ideologi” (Junaedi, 2005 : 15).

Hall juga memaparkan bahwa representasi dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai “produksi makna dari konsep-konsep yang terdapat dalam pikiran kita melalui bahasa”. Jadi, representasi “menghubungkan antara konsep-konsep dan bahasa yang memungkinkan kita untuk merujuk dunia objek-objek, orang-orang dan kejadian-kejadian fiksional yang bersifat imajiner” (Hall, 1997:17).

Representasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk yang berkonsentrasi pada analisis media dengan melihat bagaimana teks media menghadirkan kembali dunia sosial. (Devereux, 2003:162). Representasi adalah wadah di mana dapat menyebarluaskan sebuah ideologi yang dimiliki oleh budaya dominan maupun subkultur. Althusser mengatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem dari suatu representasi dimana antara satu dengan yang lain saling memberi makna dan saling berkaitan. (Burton, 2000 : 172). Selain itu representasi menjadi suatu perwujudan relasi kuasa di dalam masyarakat.

“Representasi adalah sebuah sarana untuk memancarkan ideologi dalam rangka memelihara atau memperpanjang relasi kuasa. Sehingga makna representasi adalah tentang siapa yang mempunyai kuasa dan siapa yang tidak, bagaimana kuasa diterapkan, dan nilai-nilai yang mendominasi cara-cara berfikir kita tentang masyarakat dan hubungan sosial” (Briggs&Cobley dalam Burton, 2000:175).

Menurut Barker (2004:104), representasi bukan mimesis, bukan penjiplakan atas kenyataan yang sesungguhnya, representasi adalah ekspresi estetis, rekonstruksi dari situasi sesungguhnya. (Barker dalam Ratna, 2008:124).

Senada dengan Juliastuti, ia memaknai representasi sebagai konsep yang digunakan dalam proses sosial. Pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti dialog, tulisan, video, film, dan sebagainya. Secara ringkas ia memaknai representasi sebagai produksi makna melalui bahasa. (Budiman, 2004:1). Sementara itu Devereux juga memaparkan bahwa representasi media dalam kelas sosial kurang mendapatkan perhatian dari para ahli media massa. Ini memungkinkan, dalam beberapa bagian dapat menimbulkan kenyataan dimana banyak isu tentang kelas yang tidak terbingkai seperti pada isi media. (Devereux, 2003:127).

Menurut Stuart Hall, ada dua pendekatan untuk memahami praktek representasi yaitu:

“Melalui pendekatan semiotik dan pendekatan wacana. Pendekatan semiotik berfokus pada bagaimana representasi tersebut dilakukan, pada bagaimana bahasa memproduksi makna, yang ia sebut sebagai aspek ‘puitis’. Sedangkan pendekatan wacana lebih menitikberatkan pada efek dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktek representasi tersebut, ia sebut sebagai aspek ‘politik’. Pendekatan wacana bukan hanya mengulas bagaimana bahasa dan representasi memproduksi makna, namun juga bagaimana pengetahuan yang diproduksi oleh wacana tertentu itu berhubungan dengan kekuasaan, mengatur perilaku-perilaku, mengkonstruksi identitas dan subyektivitas, juga turut menentukan cara-cara hal tertentu direpresentasikan, didiskusikan, dipraktikkan, serta dipelajari” (Hall. 1997:6).

Dalam hal ini film merupakan media yang dapat merepresentasikan realitas yang terjadi. Oleh sebab itu di dalam sebuah film terdapat kode-kode, tanda, simbol-simbol, dan lambang yang memiliki peluang cukup besar untuk dimaknai dan ditafsirkan. Melalui representasi yang ditunjukkan melalui film dapat membentuk sebuah makna baru dalam sebuah realitas yang diangkat dimana

sebelumnya sudah disepakati bersama melalui *hidden messages* yang terdapat didalam film tersebut. Salah satunya adalah yang terdapat pada “Nagabonar Jadi 2’.

5. Pembangunan Dalam Representasi Media

Layaknya seperangkat media massa yang pada dasarnya selalu dapat mengkonstruksikan setiap realita yang terjadi di sekeliling kita, dalam hal ini tanpa terkecuali sebuah realita tentang pembangunan. Banyak media massa yang mengkaji dan mengkonstruksi beberapa realita tentang pembangunan. Salah satu diantaranya adalah film. Sejumlah film memberikan perhatian terhadap tema tentang pembangunan. Seperti misalnya pada film-film yang bertema komedi satir yang berjudul “Otomatis Romantis”, “Lskar Pelangi”, “Get Married”, dan termasuk di dalamnya adalah film “Nagabonar Jadi 2”. Sebelum kita mengkaji hal ini lebih dalam, peneliti berpendapat bahwa agaknya kita perlu untuk menyamakan pemahaman kita tentang pembangunan itu sendiri terlebih dahulu.

Pada dasarnya setiap pembangunan memiliki tujuan untuk memberi perubahan bagi setiap tatanan kehidupan masyarakat pada suatu bangsa untuk menjadi lebih baik lagi. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik ini, menurut Moeljarto T bukanlah merupakan fenomena baru. Sebab, peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa yang lalu. (Moeljarto, 1995:xi). Dalam hal ini Mansour Fakih mengungkapkan bahwa:

Pada umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk

menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, ‘pembangunan’ disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. (Fakih, 2008:10).

Jika mengacu pada pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah merupakan sebuah proses dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satunya adalah proses dan usaha dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat itu sendiri. Di mana pembangunan infrastruktur atau juga biasa di sebut dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. (Grigg dalam Kodoatie, 2005:8).

Pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur disetiap wilayah ini adalah merupakan program dari setiap pemerintahan disetiap daerah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam usaha memajukan dan mensejahterakan rakyatnya di suatu daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur ini cukup menjadi perhatian akhir-akhir ini dikarenakan infrastruktur adalah sebuah bentuk sarana yang ditujukan kepada publik untuk menunjang seluruh aktivitas sosial dan ekonominya.

Hal ini juga disampaikan oleh Grigg (2000), bahwa sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. (Grigg dalam Kodoatie, 2005:9).

Prasarana atau pembangunan infrastruktur ini juga akan sangat di butuhkan tidak hanya berpusat pada daerah, akan tetapi biasanya akan lebih berdampak pada wilayah perkotaan. Sebab pada dasarnya perkembangan kota sanagat ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu penambahan penduduk baik secara alami maupun karena migrasi desa-kota atau perkembangan keadaan sosial budaya dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. (Soegijoko, dkk, 2005:5).

Keadaan ini telah berakibat kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan seperti perumahan termasuk pemecahan masalah permukiman kumuh di kota, pelayanan sosial seperti fasilitas perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas peribadatan, fasilitas pelayanan pemerintahan dan fasilitas kemasyarakatan, prasarana jalan kota dan sarana perangkutan umum, terminal, perpajakan, serta prasarana jalan dan utilitas kota seperti air bersih, drainase, sanitasi, listrik dan telpon. (Soegijoko, dkk, 2005:6).

Hal senada diungkapkan oleh Robert J Kodoatie dalam bukunya yang menyebutkan bahwa ada beberapa komponen dari pembangunan infrastruktur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh *American Public Works Assosiaciton* (APWA), yang membagi infrastruktur menjadi 13 kategori, yaitu:

Tabel 3.3
Infrastruktur menurut APWA

No	APWA
1.	Sistem penyediaan air: Waduk, pembangunan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (<i>treatment plant</i>)
2.	Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang.
3.	Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
4.	Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
5.	Fasilitas lintas air dan navigasi
6.	Fasilitas transportasi: jalan rel, bandar udara. Termasuk di dalamnya

	adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol.
7.	Sistem transit publik
8.	Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi
9.	Fasilitas gas alam
10.	Gedung publik: sekolah, rumah sakit
11.	Fasilitas perumahan publik
12.	Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
13.	Komunikasi

Sumber: Robert J kodoatie, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, 2008:122.

Ketiga belas komponen tersebut di atas, masing-masing memiliki manfaat sendiri-sendiri yang kesemuanya merupakan pendukung penuh tingkat ktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga, jika salah satu dari komponen tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka akan besar dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, seperti misalnya kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif dengan menggunakan analisis semiotika. Sebab, dalam melakukan pemaknaan sebuah film, diperlukan sebuah metodologi penelitian yang sesuai agar nantinya dapat mengungkap makna yang tersembunyi dibalik tanda-tanda yang ada dalam film. Metode penelitian kualitatif dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak berupa angka statistik. Sebab data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Selain itu penelitian ini juga mengacu pada teori dasar *The semiotic tradition*. Dimana teori ini merupakan teori yang menghasilkan teori dasar tentang bagaimana tanda dijadikan sebuah objek, ide, keadaan, situasi dan kondisi luar yang direpresentasikan dan dimaknai. Jadi, pada dasarnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanda yang disampaikan pada sebuah film, dimana tanda-tanda tersebut merupakan representasi dari sebuah situasi, ide dan kejadian-kejadian luar yang disampaikan dan direpresentasikan di dalam film itu sendiri kemudian peneliti menafsirkan apa sebenarnya makna dibalik tanda-tanda yang direpresentasikan di dalam film tersebut.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah film yang berjudul “Nagabonar Jadi 2” yang merupakan sebuah karya dari sutradara Deddy Mizwar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi simbol-simbol dan tanda yang mewakili bentuk atau tanda dari pembangunan masa sekarang semakin menyingkirkan kepentingan rakyat kecil yang muncul berupa gambar atau beberapa *scene* dan *shot* dalam film Nagabonar Jadi 2. Gambar atau simbol-simbol serta pesan-pesan diperoleh melalui

pemotongan gambar bergerak dari adegan yang terdapat pada film Nagabonar Jadi 2 yang berdurasi 118 menit 42 detik.

b. Study Pustaka

Untuk mendapatkan data pendukung dari penelitian ini terutama mengenai teori-teori maka study pustaka diambil dari makalah, surat kabar, buku-buku, internet dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini data yang terkumpul kemudian dideskripsikan sesuai dengan teori semiotik Roland Barthes, yang digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Pertama, data dibaca dan dianalisis secara kualitatif interpretatif. Dari langkah pertama ini akan didapatkan gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan mencakup apa yang dipermasalahkan. Pada langkah kedua tanda yang telah dikelompokkan baru dimaknai secara denotatif kemudian dimaknai secara konotatif. Pada tahap ini akan diketahui hal-hal yang berhubungan dengan isi. Selanjutnya, akan didapatkan pengertian secara umum dan mencakup apa yang dipermasalahkan. Maka akan jelas terlihat hubungan masalah umum yang akan menggambarkan kekuatan penyimpulan.

Proses analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan literatur pustaka dan film yang akan dianalisis dan diteliti, selanjutnya disesuaikan dengan teori-teori yang memang relevan dengan masalah serta tujuan dari penelitian yang sudah ada dan menggunakan teknik penelitian yang telah diuraikan diatas. Selain

itu untuk membantu memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tanda serta pesan-pesan yang ada pada film Nagabonar Jadi 2 ini, seperti adegan yang menggambarkan emosi, situasi, kondisi, waktu dan tempat maka secara lebih jelas kamera akan menangkap obyek dengan berbagai teknik tertentu dalam penggarapannya.

Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa unit analisa yaitu *scene* (rangkaiian *shot* dalam satu ruang atau waktu yang mempunyai gagasan yang sama), *shot* (teknik pengambilan gambar oleh kamera terhadap obyek), dialog, suara serta ukuran *Shot* yng merupakan definisi hasil pemikiran dari Arthur Asa Berger dalam bukunya *Media Analysis Techniques* guna memperjelas dan mempermudah dalam menganalisis data yang ada melalui cara pengambilan gambar dengan menggunakan teori dari Roland Barthes seperti yang dikemukakan diatas. Adapun pemikiran Arthur Asa Berger mengenai ukuran serta teknik editing sebagaimana telah disebutkan diatas penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Ukuran *Shot* (*Shot Size*), Definisi Beserta Petandanya (makna)

Penanda (<i>Camera Shot</i>)	Definisi	Petanda (artinya)
<i>Extrem Close-Up</i> (ECU)	Sedekat mungkin dengan objek (misalnya hanya mengambil bagian dari wajah.	Kedekatan hubungan dengan cerita dan atau pesan film.
<i>Close-up</i> (CU)	Wajah keseluruhan sebagai objek	Keintiman, tetapi tidak sangat dekat bisa juga menandakan bahwa objek

		sebagai inti cerita
<i>Medium Shot (MS)</i>	Setengah badan	Hubungan Personal antar tokoh dan menggambarkan kompromi yang baik
<i>Long Shot (LS)</i>	Setting dan karakter	Konteks, skop dan jarak publik
<i>Full Shot (FS)</i>	Seluruh badan objek	Hubungan sosial.

Sumber : Arthur Asa Berger, 1983, *Media Analysis Techniques*, London: Sage Publication, hal 38.